

# PRANATA KEISLAMAN

Oleh Nurcholish Madjid

Inti keagamaan seperti iman dan takwa pada dasarnya adalah individual (hanya Allah yang mengetahui iman dan takwa seseorang — seperti banyak ditegaskan dalam ajaran agama itu sendiri). Kendati begitu, para pemeluk agama tidaklah berdiri sendiri-sendiri sebagai pribadi-pribadi yang terpisah. Mereka membentuk masyarakat atau komunitas. Dan setingkat dengan kadar intensitas keagamaannya itu, masyarakat atau komunitas yang mereka bentuk bersifat sejak dari yang sangat agamis sampai kepada yang kurang atau tidak agamis.

Jika prosedur-prosedur di atas mapan, mantap, dan terlembagakan dalam masyarakat atau komunitas itu, maka pranata atau institusi terbentuk. Singkatnya, pranata ialah organ-organ kemasyarakatan yang memberi kerangka terlaksananya berbagai fungsi kemasyarakatan itu. Karena itu, dilihat dari proses pertumbuhannya, pranata berakar dalam kebiasaan orang banyak yang kemudian berkembang menjadi ukuran-ukuran, dan tumbuh matang berupa aturan-aturan atau perilaku nyata tertentu. Maka jika kebiasaan orang banyak bisa hanya berupa perilaku berulang-ulang tanpa dasar pikiran yang jelas, pranata justru memiliki ciri dasar pikiran yang jelas dan sadar, sehingga juga lebih permanen dibanding kebiasaan orang banyak saja.

Semua ahli bersepakat bahwa pranata adalah cara perilaku yang mapan. Tetapi pranata juga dapat melibatkan aspek material, seperti gedung dan organisasi yang dikaitkan kepadanya. Juga

disebutkan bahwa pranata ialah “bentuk prosedur atau kondisinya yang mapan, yang menjadi karakteristik suatu masyarakat”. Pranata juga merupakan “kompleks luas norma-norma yang dibangun masyarakat untuk dalam suatu cara yang teratur mengurus apa yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat yang fundamental”.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian itu, maka pranata keislaman ialah pranata yang dapat dipandang sebagai perwujudan atau cerminan nilai-nilai keislaman. Pranata keislaman dapat menyangkut aspek material seperti masjid, madrasah, pesantren, Kantor Urusan Agama (KUA), Departemen Agama (Depag), dan sebagainya. Ia juga menyangkut segi-segi keorganisasian seperti birokrasi Depag, kompleks hubungan kiai-santri, gerakan tarekat, majlis taklim atau kegiatan pengajian serupa yang lain, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis (Persatuan Islam), Jama'ah Tabligh, dan seterusnya.

Semua entitas itu secara institusional menunjukkan sikap-sikap tertentu kepada masalah-masalah kemasyarakatan: pro-kontra, positif-negatif, menerima-menolak, mendukung-menghambat. Kesemua sikap itu tidak dapat dipandang sebagai “*taken for granted*”, karena menyangkut nilai-nilai dan prosedur yang mapan, dan yang sama sekali tidak sederhana. Justru memahami segi tata-nilai adalah yang paling pelik, tetapi juga paling penting, jika memang dikehendaki usaha memahami inti permasalahan.

## Saluran di Luar Pranata

Harus diakui bahwa memang tidak ada kaitan satu-satu (*one to one correspondence*) antara pranata dengan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Maka dalam hal pranata Islam, juga tidak selalu, dan tidak berarti, ada hubungan tersebut. Masyarakat Islam,

---

<sup>1</sup> G. Duncan Mitchel, *A Dictionary of Sociology* (London: Routledge & Kegan Paul, 1973), s.v. “Institution”

apalagi perorangan anggotanya, selalu mungkin mendapatkan jalan memenuhi kebutuhan mendasarnya, termasuk yang bersifat keislaman, dari saluran di luar suatu pranata keislaman, misalnya dari kantor dinas tempat ia bekerja.

Bahkan tidak jarang terjadi adanya rasa tidak puas, malah terasing, seorang pribadi Muslim terhadap pranata keislaman yang ia ketahui — misalnya, kemasjidan di lingkungan RT-nya — dan tidak menganggap pranata itu sanggup mewujudkan kebutuhan mendasarnya, termasuk yang berkenaan dengan keyakinannya tentang Islam. Sementara ia kritis begitu, ia tidak kehilangan sedikit pun rasa keagamaan-(Islam)-nya, malah mungkin ia mempunyai pendapatnya sendiri tentang bagaimana seharusnya pranata itu berfungsi.

Tetapi diambil pukul rata, pranata keislaman, seperti telah dijelaskan di atas, tentu mencerminkan prosedur-prosedur mapan sebagaimana didiktekan oleh nilai-nilai yang didukungnya. Maka, berkenaan dengan berbagai masalah atau isu (kontemporer) yang dihadapi umat, sikap-sikap pranata keislaman terhadap masalah tersebut, tentu bisa ditelusuri kepada nilai-nilai dasar yang menjadi rujukan langsung atau tidak langsung sikap-sikap itu. Sikap akomodatif, memahami, dan menerima tentu bersumber kepada persepsi akan nilai-nilai yang menghasilkan sikap-sikap positif itu. Sebaliknya, sikap menghambat, menolak, dan melawan, juga bersumber kepada persepsi akan nilai-nilai yang menghasilkan sikap-sikap negatif tersebut.

### **Antara Nilai dan Tindakan**

Nilai-nilai Islam memang *seharusnya* (artinya, secara normatif) menjadi bagian dari pranata keislaman. Dan tentunya pula, jadi secara normatif lagi, ikut menentukan sikap seseorang dalam mengantisipasi dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya.

Tetapi agaknya sulit dibantah bahwa kita memang dituntut untuk selalu berdialog atau berinteraksi dengan kenyataan. Di atas telah diingatkan bahwa tidak selalu ada kaitan satu-satu antara nilai keislaman dan pranata keislaman. Juga tidak senantiasa ada hubungan satu-satu antara pranata keislaman dengan tindakan seorang atau sekelompok orang Muslim. Dalam kenyataan banyak sekali faktor yang ikut membentuk kedirian seorang anggota masyarakat, baik faktor psikologis, sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya, selain faktor nilai-nilai keagamaan. Bahkan tidak jarang tingkah laku yang tampak bersifat keagamaan pun, setelah dianalisa lebih mendalam, ternyata bermotifkan hal-hal yang mungkin justru bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya motif kedudukan, kekayaan, kekuasaan, kesukuan, kedaerahan, dan berbagai “*vested interest*” yang lain.

Dalam tinjauan hubungan sibermetik antara nilai-nilai kultural (juga keagamaan) dan tindakan, nilai-nilai berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas (jadi lebih dominan) terhadap tindakan, baik pribadi maupun kelompok. Walaupun begitu, kehati-hatian tetap diperlakukan untuk tidak begitu saja menarik garis lurus antara sejumlah nilai tertentu dengan seperangkat tindakan tertentu.

Suatu perangkat nilai tertentu, betapa pun tegasnya dipisahkan dan diidentifikasi, selalu berada dalam kaitan yang rumit dengan perangkat-perangkat nilai yang lain. Marilah kita menunjuk salah satu contoh kasus tentang program Keluarga Kecil (KK) atau Keluarga Berencana (KB) yang sejak lama diperkenalkan di masyarakat kita. Misalnya saja, seandainya kita sepenuhnya dibenarkan — jadi, artinya, belum tentu dibenarkan — untuk mengambil kesimpulan dari beberapa firman Ilahi yang berkaitan dengan KK/KB<sup>2</sup> bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan pandangan yang tidak terlalu positif kepada keinginan banyak anak, dan misalkan saja orang-orang Muslim mengetahui ajaran agamanya itu, namun tetap tidak berarti bahwa mereka mempraktikkan hidup berkeluarga kecil.

<sup>2</sup> Misalnya Q 8:28; Q 64:14-15; dan Q 57: 20

Dan memang untuk keseluruhan umat Islam, inilah yang tidak terjadi. Hal itu karena ajaran tentang tidak perlunya banyak anak itu harus berhadapan, atau dikompromikan, dengan ajaran-ajaran lain yang tidak selalu sejalan, misalnya dengan ajaran bahwa umat Islam perlu mempunyai *human resources* yang besar untuk menjadi kuat, sebagaimana sering dikhutbahkan oleh beberapa kalangan.

Dalam hal seperti itu kita barangkali berhadapan dengan problema skala prioritas nilai, yang mungkin tidak benar. Sedangkan pembuatan skala prioritas nilai yang benar hanya mungkin jika seluruh sistem ajaran yang menghasilkan seluruh sistem nilai itu diketahui dengan baik. Dan ini tentu saja sulit sekali dicapai, sekurang-kurangnya dalam tempo singkat, sehingga keinginan ke arah itu harus ditinggalkan karena tidak praktis. Apalagi jika kita punya persepsi bahwa suatu program — seperti contoh di atas tadi (program KB/KK) — adalah urgen, dan tidak bisa menunggu waktu terlalu lama untuk pelaksanaannya. Maka pendekatan menyeluruh serupa itu akan berarti penundaan sampai saat yang tidak jelas.

Tinggal yang tersisa ialah pendekatan praktis, pragmatis, tapi juga berarti fragmentaris, karena sifatnya yang *ad hoc*. Pendekatan serupa itu selalu menunjukkan hasilnya, namun dengan sendirinya juga mengandung kelemahan yang bisa serius. Misalnya, jika pendekatan serupa itu membawa kita kepada sikap memandang diri sendiri berhak memaksakan kebaikan kepada orang lain, dalam gaya “kediktatoran penuh kebajikan” (*benevolent dictatorship*). Disebut kelemahan serius, karena menyangkut problema etika: atas dasar apa, dan seberapa jauh, kita berhak memaksa orang lain, biar pun menurut kita (sekali lagi, *menurut kita*) atas nama kebaikan?

Hal ini semakin terasa ironis untuk bangsa yang telah “terlanjur” mengumandangkan konsep membangun manusia seutuhnya. Dan lebih-lebih lagi ironis jika dilakukan oleh dan terhadap para anggota pranata keislaman yang tidak membenarkan pemaksaan agama, representasi kebenaran final. [❖]